



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

PELAYANAN PERBENIHAN



**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Pelaksanaan FKP	4
3. Ruang Lingkup	5
BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP	6
1. Sumber Input dan Tema FKP	6
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
3. Penyelenggara dan Peserta FKP	6
4. Metode Pelaksanaan FKP	8
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Analisis	11
3. Rencana Aksi	12
BAB IV. PENUTUP	14
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	
LAMPIRAN V. HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA	
LAMPIRAN VI. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAKSANAAN DAN PELAPORAN FKP	

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain adalah:

1. Mensosialisasikan dan mempublikasikan pelayanan UPTD. Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menampung aspirasi, masukan, saran, dan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan;
3. Membangun komunikasi dengan melibatkan partisipasi aktif antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan atau masyarakat, seperti petani, kelompok tani, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya;
4. Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, sarana prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan;
5. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelayanan yang dihadapi masyarakat pengguna layanan maupun penyelenggara layanan, serta menyusun rekomendasi perbaikan;
6. Merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi bersama dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
9. Mendorong inovasi pelayanan dengan penggunaan pemanfaatan layanan digital seperti pelayanan *online/daring*;
10. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan melalui keterbukaan informasi dan dialog yang konstruktif;

3. Ruang Lingkup

Lingkup pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah **“PELAYANAN PERBENIHAN UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN”**.

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Forum Konsultasi Publik ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi isu strategis perbenihan, perkembangan regulasi/kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mengambil tema “PELAYANAN PERBENIHAN UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN”.

Tema Forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan akan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perbenihan di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Agustus 2026
Tempat	: Ruang Rapat UPTD BPPSPTPHP
Pelaksanaan	Jalan Raya Tembeling, Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya-Kabupaten Bintan.

3. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Peserta FKP

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari penyelenggara pelayanan, pengguna layanan, akademisi, media, pelaku usaha, perwakilan OPD Teknis, kelompok tani dan perwakilan lapisan masyarakat lainnya.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unsur sebagai berikut :

Via Daring / Zoom Meeting diikuti oleh :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
2. KPID Provinsi Kepulauan Riau;
3. RRI Tanjungpinang;
4. TVRI Kepulauan Riau;
5. Ketua KTNA Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna;
7. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
8. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam;
11. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang;
12. Ketua Kelompok Tani Nyiur Melambai di Kabupaten Karimun;
13. Ketua Kelompok Tani Remik Berjaya di Kabupaten Lingga;
14. Ketua Kelompok Tani Buluh Serumpun di Kabupaten Natuna;
15. Pejabat Fungsional POPT Ahli Muda Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir Langsung, dihadiri oleh :

1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
3. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I, M.Si (Akademisi / Dosen Pasca Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji);
4. Kepala UPTD Perbenihan dan Perbibitan Kabupaten Bintan;
5. PT. Bakti Tani Nusantara;
6. Ketua Kelompok Tani Poyotomo Makmur di Kabupaten Bintan;

7. Ketua Kelompok Tani Milenial Kreatif di Kabupaten Bintan;
8. Ketua Kelompok Tani Sumber Kelapa di Kabupaten Bintan;
9. Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya di Kabupaten Bintan;
10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
11. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Provinsi Kepulauan Riau;
13. Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama Provinsi Kepulauan Riau;
14. Pejabat Fungsional POPT Ahli Pertama Provinsi Kepulauan Riau.

4. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilakukan dengan metode hybrid yaitu secara tatap muka/kehadiran langsung dan melalui online daring zoom meeting. Pelaksanaan dilaksanakan secara 2 (dua) arah dan dialog terbuka, partisipatif dengan penyampaian materi pembahasan oleh narasumber, diskusi tanya jawab, identifikasi masalah dan diakhiri dengan rekomendasi permasalahan terkait. serta diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara penyelenggara pelayanan, pengguna layanan, akademisi, media, pelaku usaha, perwakilan OPD Teknis, kelompok tani dan perwakilan lapisan masyarakat lainnya.

Susunan acara pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang secara detail dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembukaan
 - Acara dibuka oleh Pembawa Acara/MC
 - Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sholawat Busro.

- Sambutan oleh Kepala UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus memimpin rapat.
- Sambutan dan sekaligus pembukaan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, menyampaikan pentingnya melibatkan lintas sektor dalam penyusunan standar pelayanan.
- Pembacaan Do'a

2. Pemaparan Materi

Tim teknis dari UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (diwakili oleh Seksi Pengembangan dan Produksi Benih dan Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman) memaparkan kerangka kerja dan penjelasan pelayanan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.

Disampaikan delapan komponen utama Standar Pelayanan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu :

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- c. Jangka Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya Tarif;
- e. Produk;
- f. Pengaduan Saran dan Masukan.

3. Diskusi dan Masukan Stakeholder

Setelah pemaparan dan penjelasan layanan perbenihan, dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik baik yang menghadiri secara langsung maupun dari peserta yang mengikuti zoom meeting.

4. Penutup

Setelah ditandatangani Berita Acara Forum Konsultasi Publik, rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB oleh Kepala UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari Forum Konsultasi Publik ini baik saran dan masukan akan segera ditindaklanjuti, sehingga terwujud pelayanan yang berkualitas, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Susunan acara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Jam Pelaksanaan	Kegiatan	Ket
Kamis, 20 Agustus 2026 09.00 – 10.00	- Pembukaan Acara oleh MC	
	- Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
	- Sholawat Busyro	
	- Laporan Kepala UPTD BPPSPTPHP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	
	- Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	
	- Doa	
10.00 - 11.50	- Pemaparan Pelayanan Produksi Benih	
	- Pemaparan Pelayanan Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman	
	- Kegiatan Diskusi	
11.50 – 12.00	- Penandatanganan Berita Acara, Kegiatan Foto bersama Penutupan Acara	

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pelayanan perbenihan dan beberapa aspek teknis yang masyarakat belum mengetahui regulasinya terkait pelaksanaan pemeriksaan. Terkait aspek teknis pemeriksaan yang menjadi pertanyaan peserta FKP, bisa dilihat dalam berita acara hasil pelaksanaan FKP terlampir dalam laporan ini.

Sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada. Pertama, belum optimalnya sosialisasi terkait pelayanan yang ada di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Kedua, belum ada SOP tentang Prosedur Pemusnahan Bibit Afkir. Ketiga, sarana pendukung pelayanan untuk kelompok rentan masih perlu dilengkapi, seperti kursi roda dan tongkat disabilitas. Keempat, selama ini bantuan yang sampai kepada masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan dan tidak memperhitungkan iklim dan kesesuaian tanah dengan komoditi yang diperbantukan.

2. Analisis

Sesuai dengan hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan, terdapat identifikasi permasalahan. Pertama, penyelenggara pelayanan harus menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pelayanan yang setara, tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, gender/jenis kelamin, maupun kondisi fisik. Kedua, publikasi jenis pelayanan sangat penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat (baik

itu masyarakat umum, kelompok petani, pelaku usaha, kelompok rentan, anak muda, dan golongan masyarakat lainnya) agar mereka mengetahui, memahami, dan dapat mengakses hak atau layanan yang tersedia secara tepat, mudah dan transparan. Untuk itu diperlukan publikasi yang masif dengan menggunakan media yang efektif sebagai sarana penyambung informasi seperti website, sosialisasi tatap muka, media sosial, dan media masa lainnya. Ketiga, perkembangan regulasi/kebijakan. Perubahan aturan atau regulasi baru harus disertai sosialisasi yang jelas dan penyesuaian aturan pelaksana agar bisa diterapkan dengan lancar di lapangan. Perubahan regulasi atau adanya regulasi baru mengharuskan unit penyelenggara layanan untuk merevisi cara kerja lama agar sesuai dengan ketentuan baru atau ketentuan perubahan. Keempat, bantuan benih atau bibit yang tepat sangat krusial bagi keberhasilan pertanian. Menyesuaikan benih dengan iklim dan kesuburan tanah setempat menentukan hidup atau matinya tanaman, efisiensi biaya, dan keberhasilan program bantuan.

3. Rencana Aksi

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan merencanakan beberapa aksi perbaikan.

Berikut rencana aksi atau langkah langkah yang akan dilakukan terkait permasalahan yang ada. Pertama, secepatnya mensosialisasikan setiap jenis layanan yang ada di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menggunakan media yang umum bisa diakses oleh masyarakat banyak seperti TVRI, RRI dan Media lainnya. Kedua, membuat SOP tentang pemusnahan bibit AFKIR sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Pertanian kedalam standar pelayanan di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan koordinasi dengan kantor Karantina Pertanian Republik Indonesia terkait pemusnahan benih AFKIR Tanaman.

Ketiga, pengadaan sarana kelompok rentan seperti kursi roda untuk disabilitas, tongkat dan sarana lainnya pada tahun 2027. Keempat, menyampaikan ke internal tentang permasalahan program-program bantuan agar mempertimbangkan secara teknis aspek kesesuaian iklim dan kesesuaian lahan dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat untuk program-program bantuan yang diberikan serta melengkapi sarana peralatan terkait pengujian teknis.

BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, dengan ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini diharapkan dapat membantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan prima, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DEBRIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19741208 200212 2 005

LAMPIRAN I
BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124
TANJUNGPINANG

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
TENTANG PELAYANAN PERBENIHAN UPTD BALAI PERBENIHAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat diruangan rapat UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dan acara ini juga diselenggarakan melalui daring/online (zoom meeting), telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah tersedianya dokumen Standar Pelayanan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang adaptif, inovatif dan berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

1. Aspek Pelayanan

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Selama ini bantuan yang sampai kepada masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan dan tidak memperhitungkan iklim dan kesesuaian tanah dengan komoditi yang diperbantukan. (Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I, M.Si (Akademisi / Dosen Pasca Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji)	1. Menyampaikan permasalahan ini ke Dinas untuk program-program bantuan dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan masyarakat, kecocokan iklim dan kesesuaian lahan.	1 Hari
		2. Pengadaan alat ukur kadar tanah (basah dan kering) dan pengadaan alat uji kadar pupuk.	1 Tahun
2.	Belum optimalnya sosialisasi terkait pelayanan yang ada di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Afriani /	Mensosialisasikan setiap Jenis Layanan yang ada di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menggunakan	1 Tahun

	KPP Pengembangan Usaha TVRI Kepulauan Riau)	media TVRI, RRI dan Media lainnya	
3.	Belum ada SOP tentang Prosedur Pemusnahan Bibit Afkir (Ansor Agus Proni, S.P/ PT. Bakti Tani Nusantara)	Membuat SOP tentang Pemusnahan Bibit AFKIR sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Pertanian	1 Tahun
		Melakukan koordinasi dengan Karantina Pertanian terkait Pemusnahan Benih AFKIR Tanaman	1 Tahun
4.	Sarana Pendukung Pelayanan Untuk Kelompok Rentan masih perlu dilengkapi, seperti kursi roda, tongkat	Pengadaan Kursi Roda untuk Disabilitas, Tongkat dan sarana lainnya	1 Tahun

2. Aspek Teknis Pemeriksaan

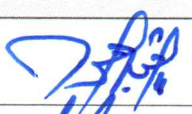
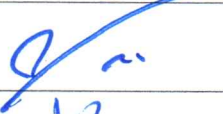
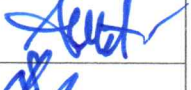
No.	Pertanyaan	Penanya	Jawaban
1.	Terkait Pengujian Kadar Air pada Tanaman Padi yang dipersyaratkan • Benih Penjenis • Benih Dasar • Benih Pokok • Benih Sebar	Astrid, BRMP	Pengujian Kadar Air pada Tanaman Padi • Benih Penjenis 13% • Benih Dasar 13% • Benih Pokok 13% • Benih Sebar 13%
2.	Warna Benih padi yang Kecoklatan, apakah itu benih yang tidak murni	Astrid, BRMP	Perubahan warna pada benih padi belum tentu menunjukkan ketidakmurnian benih. Perubahan warna bisa disebabkan oleh beberapa faktor : Jamur, Hama, Kelembaban dan lainnya.
3.	Berdasarkan KEPMENTAN No.4/Kpts/KB.020/E/01/2025 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Kelapa Sawit disebutkan bahwa benih yang berada pada usia 18 - 24 bulan harus dapat rekomendasi dari Pemulia. Kenapa PT. BTN tidak boleh menggunakan pemulia internal dari PT.BTN	Ansor Agus Proni, S.P/ PT. Bakti Tani Nusantara	Setiap pemulia tanaman yang melakukan pemeriksaan benih tanaman umur 18-24 bulan, harus di tetapkan melalui SK DIRJENBUN
4.	Prosedur Untuk menambah PIT Kelapa dan usulan Baru Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa	Rahim, Penyuluh Muda	BPSB mengusulkan menambah PIT dan usulan baru BPT ke DIRJENBUN berdasarkan hasil identifikasi awal oleh fungsional

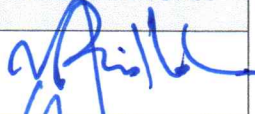
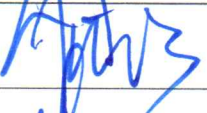
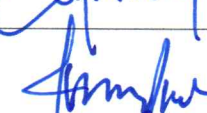
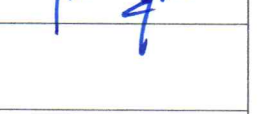
		Kabupaten Lingga	PBT berdasarkan surat usulan dari petani / kelompok tani
5.	Belum ada Standar Pelayanan yang mengakomodir tentang Perizinan Tanaman Sagu	Rahim, Penyuluh Muda Kabupaten Lingga	Standar pelayanan tanaman Sagu sama dengan standar pelayanan tanaman perkebunan lainnya dan sudah ada dalam standar pelayanan UPTD. BPPSPTPHP
6.	Benih bantuan yang diterima oleh masyarakat diragukan keabsahan dokumennya.	Kokom Rohayati, S.P POPT Ahli Muda Kota Tanjungpinang	Sebelum bibit diserahkan kepada masyarakat (petani/kelompok tani), pihak dinas terkait harus berkoordinasi dengan UPTD.BPPSPTPHP Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan dokumen asal usul dan melakukan uji laboratorium serta berkoordinasi dengan PBT asal sumber benih
7.	Identifikasi OPT yang ada di Laboratorium UPTD BPPSPTPHP apakah sudah sampai ke identifikasi virus dan bakteri?	Kokom Rohayati, S.P POPT Ahli Muda Kota Tanjungpinang	Identifikasi OPT yang ada di Laboratorium UPTD BPPSPTPHP belum sampai ke identifikasi virus dan bakteri, karena belum mempunyai analis laboratorium
8.	Terkait Diseminasi Benih Tanaman Padi, apakah produsen benih (BRMP) yang sudah melakukan kegiatan perbenihan beberapa kali dilokasi lahan yang sama, boleh memproduksi benih dengan tingkatan label yang lebih tinggi di lokasi yang berbeda	Firsta A. Sariri, BRMP	Kegiatan Diseminasi Benih Tanaman Padi diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan. Seperti pemeriksaan dokumen, tata letak lokasi, dan harus memakai varietas benih yang sama dan harus melewati uji mutu laboratorium sesuai standar benih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian Berita Acara Rapat ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

No.	NAMA	NO HP	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	FIRSTA A. SARIRI	082141709697	BRMP KEPRI	
2.	ALI ARHAM	081364082112	POKTAM	
3.	Nonik Supatri	082170471230	UPTD Perbenihan Bintan	
4.	CHANDRA DEWI	081364087178	PBT Kab Bintan	
5.	Romadona	08526440099	PT. BAKTI TANJUNGPINANG	
6.	OK PARIZAN	081277431792	UMPAH	
7.	LISAHDAH	081266639990	KASUB. KEMPEG	
8.	Achmad Fauzan	0811699442	Brdaag Perkebunan	
9.	SUPROSO	083152341307	Pontan milenial	
10.	SACH	081564052551	KT. Sumberbaop	
11.	RUSU		SEKRAI DCPZKH	
12.	HERLINA H	081270994949	PBT	
13.	Astrid Fransisca	081303253805	BRMP KEPRI	
14.	HAIRUN YAHIR	085365722523	PBT	
15.	JOJO SENGIOZ	081267060974	pengelola Layan	
16.	Adnan	0811771166	Penyelenggara kyanan	

No.	NAMA	NO HP	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
17.	Adi Satrio K	085265257857	BPPSP TPHP	
18.	NIL ERISON	0811704617	Penyenggara Layanan	
19.	Rika Azmi	082285225678	Kadus	
20.	Melati Susanto	085264067902	PBT Ali Pertama.	
21.	ANSOR A. Proni	08117712203	GM. BTN	
22.	K. Ardede	082283967712	POPT Ali Pertama	
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

KEPALA UPTD BALAI PERBENIHAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN,



NIL ERISON, S.TP
NIP. 19750312 200502 1 005

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DR. RIKA AZMI, S.TP., M.M
NIP. 19741208 200212 2 005

LAMPIRAN II
SALINAN DAFTAR HADIR



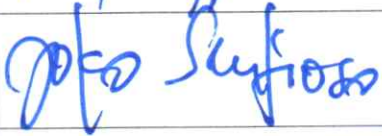
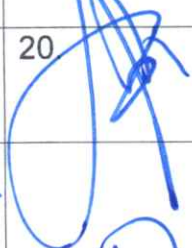
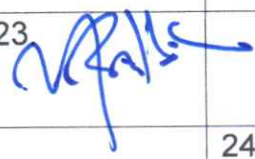
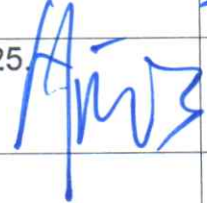
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN

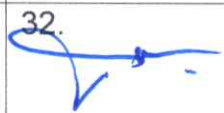
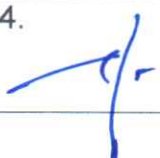
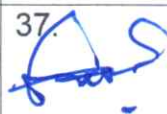
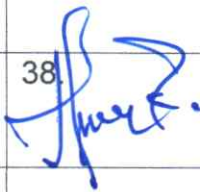
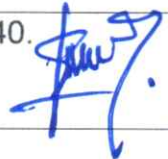
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124
TANJUNGPINANG

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK
TENTANG PELAYANAN PERBENIHAN UPTD BALAI PERBENIHAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2026

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2026
Tempat : Ruang Rapat UPTD. BPPSPTPHP
Jalan Raya Tembeling, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan - Povinsi Kepulauan Riau.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ALI ASPAH	PORTAM.	1.
2.	SUBRI RENDAN	Sekretaris KH	2.
3.	ROMADON	ASSI. Marketing PT. BTN	3.
4.	ANSOR A. PRONI	General Manager PT. BTN	4.
5.	Chandra Dewi	DEPP Bintan	5.
6.	Nani Suwandi	Ka. UPTD Benil	6.
7.	FIRSTA A. SARINI	KAPOKSI PENERAPAN & PENYALING KESEKUTUAN BIMP KEPRI	7.
8.	OKPARIZAN	UMTAH	8.
9.	LSKANDAN	KASUBAG UMPEG	9.
10.	Kony	Staf BPP2KH	10.
11.	SUKOSO	Sekretaris Mitenial	11.
12.	SAIDI	KT. Sumba Koperasi	12.

13.	Astrid Fransisca	Katimker Kerja sama Layanan & Pendidikan Kesehatan	13.		
14.	Akhy Davina Dewi	Staff DEPZKH		14.	
15.	KRISTINA PAREDE	PBT AHLI Pertama	15.		
16.	Achmad Fauzan	PBT		16.	
17.	Iris Sholihah	PBT	17.		
18.	Adnan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		18.	
19.	FATMA Anggra S.	STAF	19.		
20.		Keri - Pengubasan as Prokurasi Bler		20.	
21.	Arif Kenedy . S.E	staff	21.		
22.	Dimas Febriani Dp	Staff		22.	
23.	Ade Satrya k.	Kasir Wasdarlintan	23.		
24.	BACU SUBATMANO	STAF		24.	
25.	NIL ERLSON	Ka UPTD BPPSPTRHP	25.		
26.	BARUS	STAF		26.	
27.	FAHMY . ZR	STAF	27.		
28.	Yoyati Suhayati	- 11 -		28.	

29.	Srimulasih Restari	staf	29.		
30.	Molba Sucand S.TP	PBT		30.	
31.	HAIRUN Syahri	PBT	31.		
32.	Husni Mulana	staf		32.	
33.	Heklina H H	PBT	33.		
34.	SUPRISMA	staf		34.	
35.	TOWO	"	35.		
36.	TAM	"		36.	
37.	DION	"	37.		
38.	HENDRI	"		38.	
39.	TITIN	"	39.		
40.	ANY	"		40.	

KEPALA UPTD BPPSP-TPHP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


NIL ERISON, S.TP
NIP. 19750812 200502 1 005

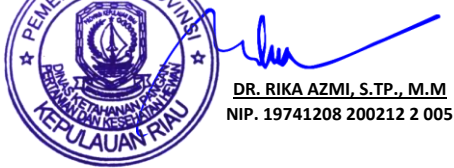
DAFTAR HADIR (ZOOM MEETING) FORUM KONSULTASI PUBLIK TENTANG PELAYANAN PERBENIHAN UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	Nama Lengkap	Email	Asal Instansi/Organisasi	Jabatan	Nomor HP	Status/Kategori Peserta	Saran/Masukan Terhadap Pelayanan	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Perbenihan
1	Okky Devina Dewi, SP	okkydevina93@gmail.com	DKPPKH PROV KEPRI	Penelaah Teknis Kebijakan	08117743999	Pemerintah/Instansi	Sudah bagus	5 = Sangat Puas
2	Raden Rara Marisa Fajar Nastiti, S.P.	marisa44sm@gmail.com	DKP2KH prov kepri	POPT Muda	081266993160	Pemerintah/Instansi	-	5 = Sangat Puas
3	Kokom Rohayati, SP	qoqomu@gmail.com	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang	POPT Ahli muda	085220197144	Pemerintah/Instansi	Perlu adanya penyebarluasan informasi agar masyarakat atau pengguna jasa mengetahui berbagai pelayanan yang ada di BPPSPTPHP, meningkatkan fungsi pelayanan identifikasi OPT	4 = Puas
4	Raja Widiyaningsih,SE	ewid.2010@gmail.com	RRI Tanjungpinang	Pranata Humas Ahli Pertama	081364150198	Pemerintah/Instansi	Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri melalui berbagai media khususnya dalam hal permohonan Permintaan Benih	4 = Puas
5	Bagus Sugiatmoko, S. P	bagussugiatmoko80@gmail.com	Dinas Kerahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Prov Kepulauan Riau	Pengadministrasi Perkantoran	081275595975	Pemerintah/Instansi	Mantap	4 = Puas
6	RAZUL, S.Pd, SD	adzkalathifah82@gmail.com	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Bidang Perkebunan	082285653609	Pemerintah/Instansi	-	5 = Sangat Puas
7	Adawiyah	adawiyahyazid70@gmail.com	LPP RRI Tanjungpinang	Plt. Kabag Tata Usaha	08117772970	Pemerintah/Instansi	sudah bagus	4 = Puas
8	HUSNI MUBARAK, S.Si	hmubaraq79@gmail.com	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Penelaah Teknis Kebijakan	08117034565	Pemerintah/Instansi	Senyum, Sapa dan Salam	4 = Puas
9	RISKA MAYA SYARI NASUTION, S.P	riskamayasyari@gmail.com	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	081263830648	Pemerintah/Instansi	-	4 = Puas
10	Dwi Rofina Sari, S.E.	dwirofinasari98@gmail.com	TVRI Stasiun Kepulauan Riau	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	08127606994	Pemerintah/Instansi		4 = Puas
11	FANY ANGGIA SAPUTRA, SE	fanyastra212@gmail.com	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	081371521525	Pemerintah/Instansi	LANJUTKAN	4 = Puas
12	BARUS	barus7250@gmail.com	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	STAFF	081371948424	Pemerintah/Instansi	LANJUTKAN	4 = Puas
13	KRISTINA PARDEDE, STP	kristinapardede1708@gmail.com	UPTD. BPPSP-TPHP PROV KEPRI	POPT AHLI PERTAMA	082283967712	Pemerintah/Instansi	-	5 = Sangat Puas
14	Ade Satrya Khairunsyah	adesatrya@gmail.com	UPTD BPPSPTPHP Prov. Kepri	Kepala Seksi	085265257897	Pemerintah/Instansi	-	4 = Puas
15	Herlina Husin Hasima	herlinahusin3@gmail.com	UPTD BPPSPTPHP	Pengawas Benih Tanaman, SP	081270994949	Pemerintah/Instansi	Lanjutkan	5 = Sangat Puas
16	Afriani	afriani.inbox@gmail.com	TVRI Kepulauan Riau	KPP Pengembangan Usaha	082215761370	Pemerintah/Instansi	Harapannya hasil dari forum ini pelayanan menjadi semakin transparan, lengkap dan terfasilitasi penuh dalam setiap proses menerbitkan bibit unggul bagi konsumen dan produsen benih Provinsi Kepulauan Riau.	4 = Puas
17	Raju radiansah	rajuradiansah23@gmail.com	Natuna	Ketua	082172373925	Petani/Kelompok Tani	Pelayanan sudah sangat baik	5 = Sangat Puas
18	Muhammad saidi	saidi.kawal1818@gmail.com	KT Sumber kelapa tanjung kapur	Ketua	081364052555	Petani/Kelompok Tani	Agar selalu transparan dalam pemberian informasi	4 = Puas
19	M.Ali		KARIMUN	SEKRETARIS	081266641050	Petani/Kelompok Tani	Baik	4 = Puas

KEPALA UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN


NIL ERISON, S.TP
NIP. 19750312 200502 1 005

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


DR. RIKA AZMI, S.TP., M.M
NIP. 19741208 200212 2 005

LAMPIRAN III
SURAT UNDANGAN



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

Bintan, 13 Agustus 2026

Nomor : 000.1/33/DKP2KH/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di

Tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik tentang Layanan Perbenihan di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat UPTD BPPSPTPHP
Jalan Raya Tembeling, Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya-
Kabupaten Bintan.
Agenda : Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Partisipasi aktif dan masukan dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang prima, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

**KEPALA UPTD BPPSP-TPHP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**NIL ERISON, S.TP
NIP. 19750312 200502 1 005**

Lampiran I.

Nomor : 000.1/33/DKP2KH/2026

Tanggal : 13 Agustus 2026

DAFTAR UNDANGAN :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
3. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I, M.Si (Akademisi / Dosen Pasca Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji);
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
5. Kepala UPTD Perbenihan dan Perbibitan Kabupaten Bintan;
6. PT. Bakti Tani Nusantara;
7. Ketua Kelompok Tani Poyotomo Makmur di Kabupaten Bintan;
8. Ketua Kelompok Tani Milenial Kreatif di Kabupaten Bintan;
9. Ketua Kelompok Tani Sumber Kelapa di Kabupaten Bintan;
10. Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya di Kabupaten Bintan;
11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Provinsi Kepulauan Riau;
14. Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama Provinsi Kepulauan Riau;
15. Pejabat Fungsional POPT Ahli Muda Provinsi Kepulauan Riau; dan
16. Pejabat Fungsional POPT Ahli Pertama Provinsi Kepulauan Riau;

Lampiran II.

Nomor : 000.1/33/DKP2KH/2026

Tanggal : 13 Agustus 2026

**SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
TENTANG PELAYANAN PERBENIHAN DI UPTD BALAI PERBENIHAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jam Pelaksanaan	Kegiatan		Penanggung Jawab	Ket
Kamis, 20 Agustus 2026 09.00 – 10.00	-	Pembukaan oleh MC	Herlina Husin Hasima, S.P	
	-	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Melda Susanti, S.TP	
	-	Sholawat Busyro	Melda Susanti, S.TP	
	-	Laporan Kepala UPTD BPPSPTPHP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Nil Erison, S.TP	
	-	Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M	
	-	Doa	Hairun Syahri, S.P	
10.00 - 11.50	-	Pemaparan Pelayanan Produksi Benih	Joko Sentioso, S.Hut (Kasi Pengembangan dan Produksi Benih)	
	-	Pemaparan Pelayanan Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman	Ade Satrya K, S.TP (Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman)	
11.50 – 12.00	Penutupan			



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

Bintan, 13 Agustus 2026

Nomor : 000.1/34/DKP2KH/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di

Tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik tentang Layanan Perbenihan di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Daring Via Zoom Meeting
Meeting ID : 988 5483 8904
Passcode : BPPSPTPHP
Link Zoom : <http://telkomsel.zoom.us/j/98854838904?pwd=sPbrUAfeSNKghRMahmArbVNaTCfb5l.1>

Agenda : Forum Konsultasi Publik tentang Pelayanan Perbenihan di UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Partisipasi aktif dan masukan dari Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang prima, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

**KEPALA UPTD BPPSP-TPHP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



NIL ERISON, S.TP
NIP. 19750312 200502 1 005

Lampiran I.

Nomor : 000.1/34/DKP2KH/2026

Tanggal : 13 Agustus 2026

DAFTAR UNDANGAN :

1. KPID Provinsi Kepulauan Riau;
2. RRI Tanjungpinang;
3. TVRI Kepulauan Riau;
4. Ketua KTNA Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam;
10. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
11. Ketua Kelompok Tani Nyiur Melambai di Kabupaten Karimun;
12. Ketua Kelompok Tani Remik Berjaya di Kabupaten Lingga;
13. Ketua Kelompok Tani Buluh Serumpun di Kabupaten Natuna;

Lampiran II.

Nomor : 000.1/34/DKP2KH/2026

Tanggal : 13 Agustus 2026

**SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
TENTANG PELAYANAN PERBENIHAN DI UPTD BALAI PERBENIHAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jam Pelaksanaan	Kegiatan		Penanggung Jawab	Ket
Kamis, 20 Agustus 2026 09.00 – 10.00	-	Pembukaan oleh MC	Herlina Husin Hasima, S.P	
	-	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Melda Susanti, S.TP	
	-	Sholawat Busyro	Melda Susanti, S.TP	
	-	Laporan Kepala UPTD BPPSPTPHP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Nil Erison, S.TP	
	-	Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M	
	-	Doa	Hairun Syahri, S.P	
10.00 - 11.50	-	Pemaparan Pelayanan Produksi Benih	Joko Sentioso, S.Hut (Kasi Pengembangan dan Produksi Benih)	
	-	Pemaparan Pelayanan Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman	Ade Satrya K, S.TP (Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman)	
11.50 – 12.00	Penutupan			

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI KEGIATAN



DKP2KH
Provinsi Kepulauan Riau

FORUM KONSULTASI PUBLIK

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan
Mamukha Loyd Adegif Katabawati

**#bangga
melayani
bangsa**

tentang

PELAYANAN PERBENIHAN

**UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.
Gubernur Kepulauan Riau

Nyanyang Haris Pratomo, S.E., M.Si.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau



PARTISIPATIF



TRANSPARAN



AKUNTABEL



RESPONSIF

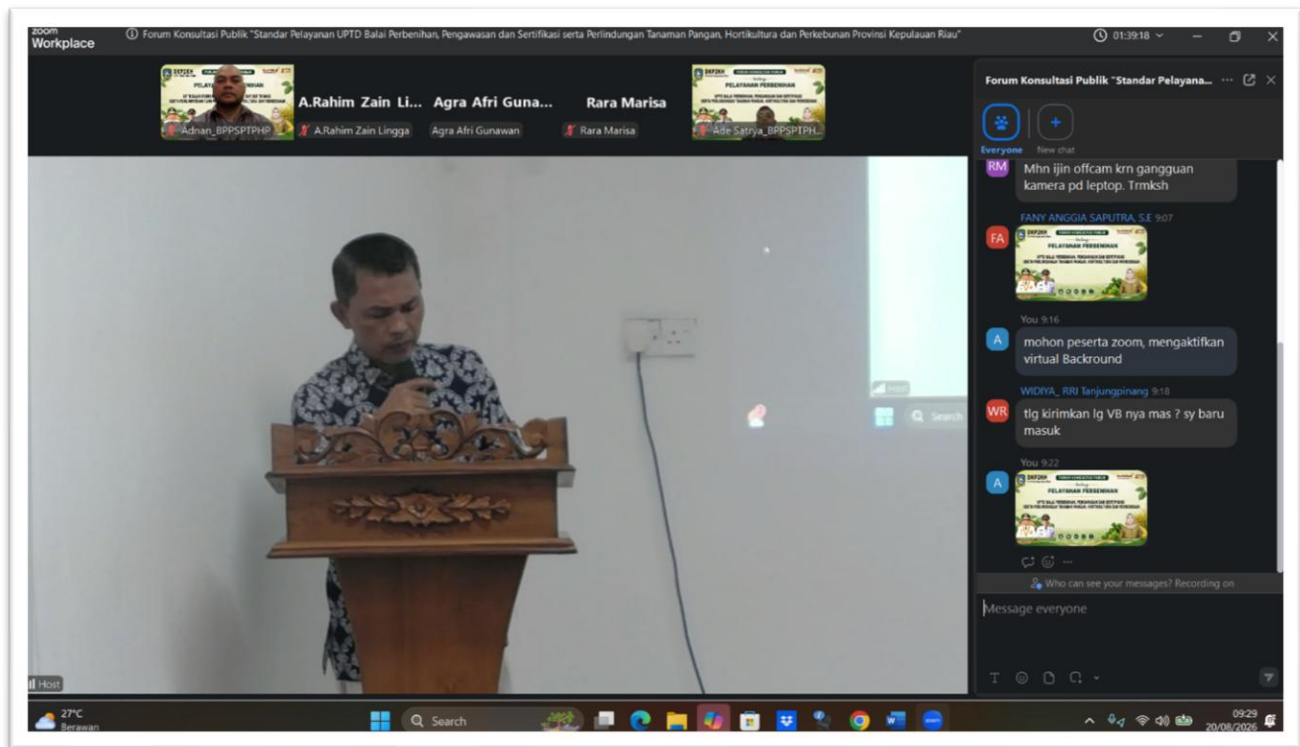


BERKUALITAS

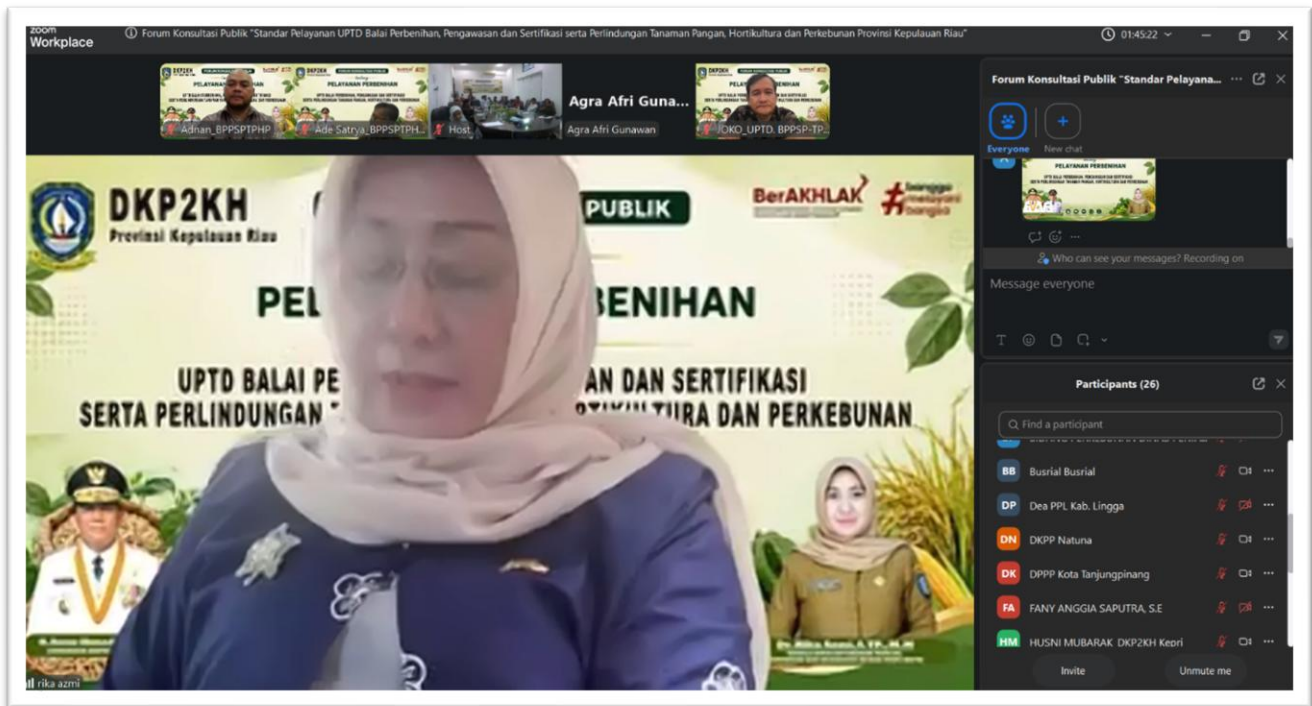


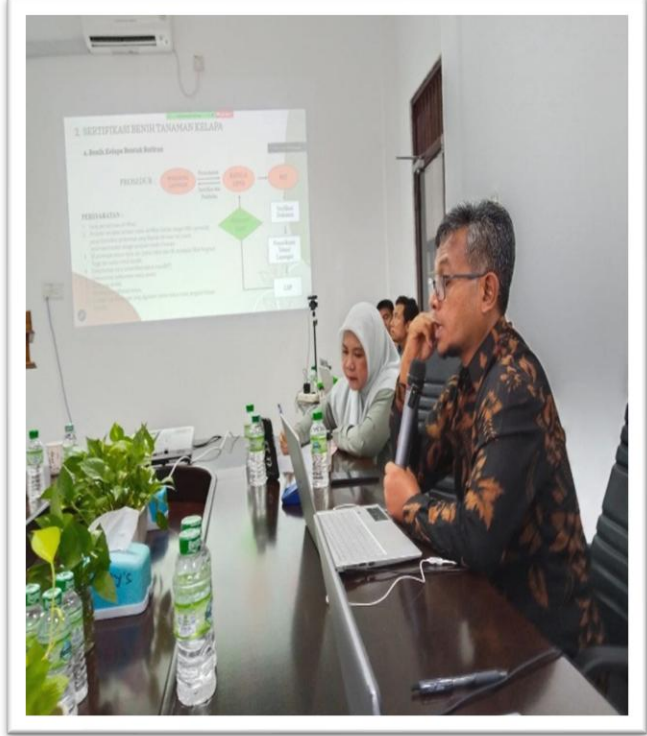
Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau



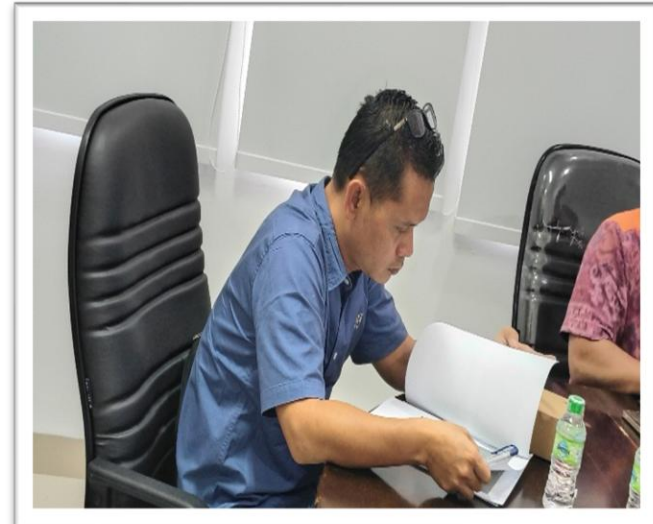








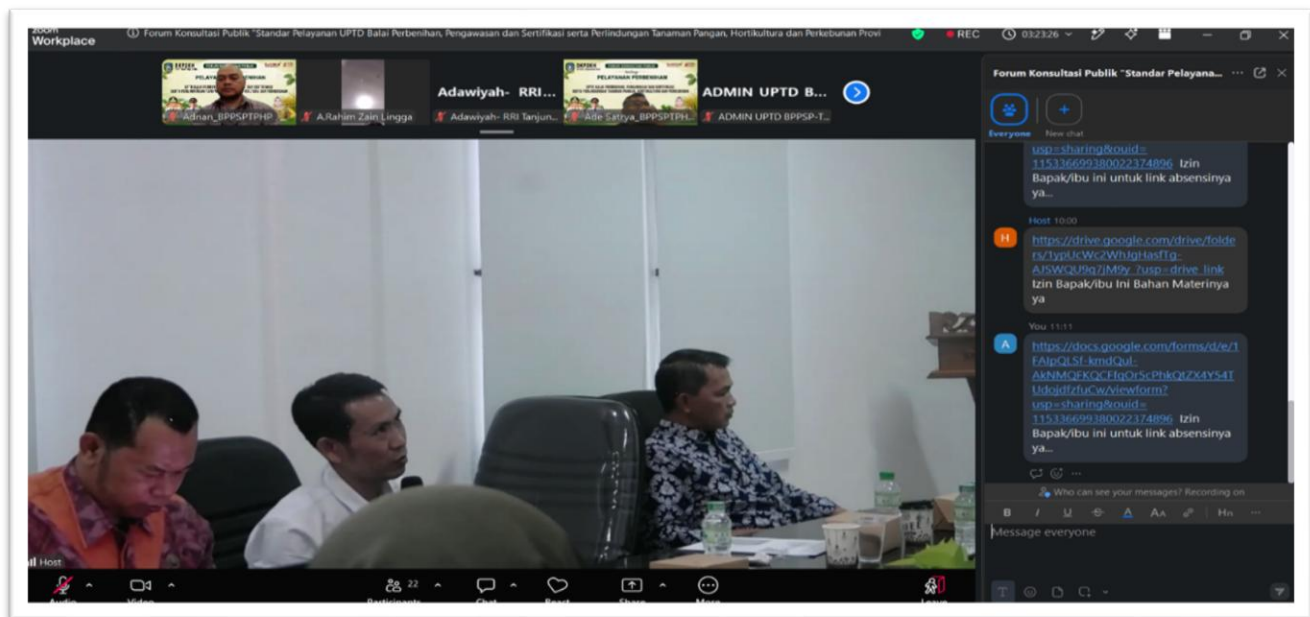




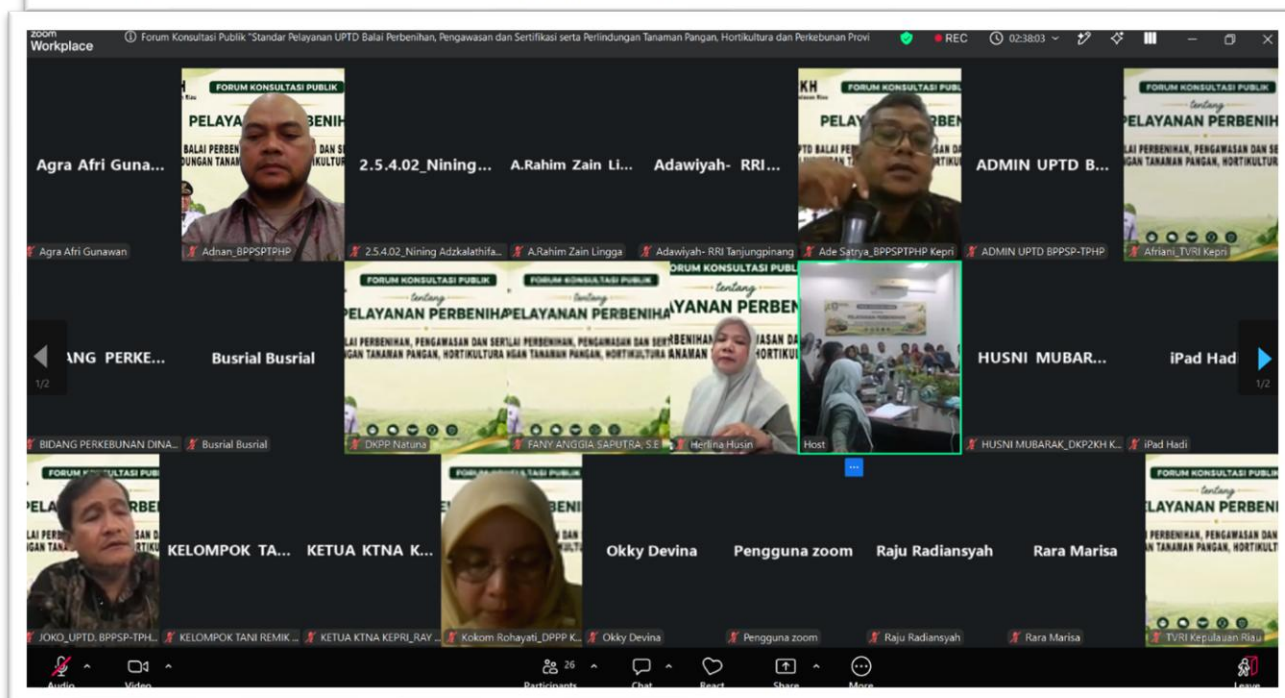
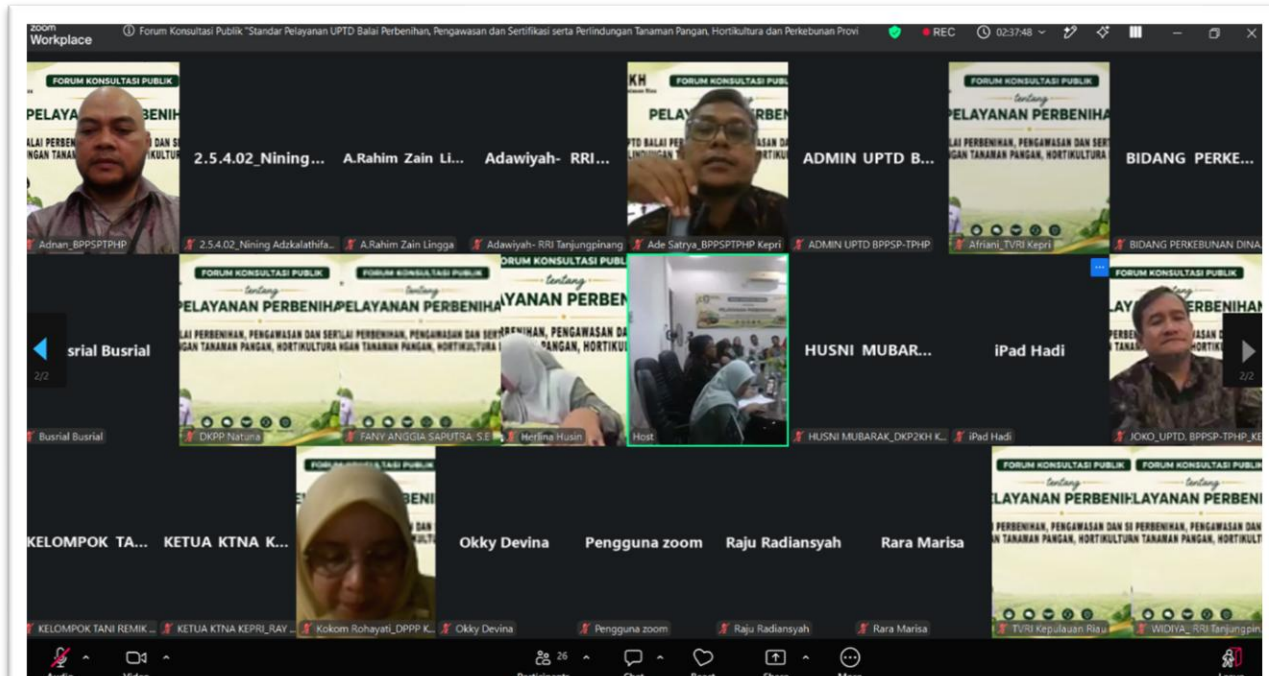














DKP2KH PROVINSI KEPRI GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PERKUAT LAYANAN DAN SINERGI

📅 20 Agustus 2026, 19:23 WIB 👁 63 kali dibaca

Kategori : **Pertanian**



Kepala DKP2KH Provinsi Kepri Dr. Rika Azmi, S.T.P., M.M. Membuka Acara dan Foto Bersama Peserta yang Hadir Pada Acara FKP.

Kategori Berita

Semua Kategori

Ketahanan Pangan

Pertanian

Kesehatan Hewan

Umum

Sekretariat

Perkebunan

LAMPIRAN V
HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124
TANJUNGPINANG

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN UPTD BALAI PERBENIHAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang telah ditandatangani pada 29/12/2025. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu yang tercantum pada Komponen Penyampaian Layanan dengan realitas proses teknis di lapangan maupun standar nasional, seperti : a. Pada Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, Hortikultura (Buah/Sayur/Biofarm aka), dan Rekomendasi Pengedar/Produsen, jangka waktu ditetapkan secara seragam 7 (tujuh) hari kerja. Padahal, proses pengujian mutu benih di laboratorium (seperti uji daya kecambah) membutuhkan waktu fisiologis tanaman (14–21 hari), belum termasuk verifikasi lapangan dan	Lakukan perbaikan norma penyelesaian layanan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) teknis di lapangan. Buat perhitungan waktu penyelesaian layanan terpisah berdasarkan masing-masing tahapan dalam tiap proses layanan tersebut.	Bentuk Tindak Lanjut	Telah dilakukan Perubahan pada Standard Pelayanan Nomor 136/Kpts-DKP2KH/I/2026 tanggal 5 Januari 2026
			Waktu Pelaksanaan	Sesuai Berita Acara FKP diberikan waktu selama Enam (6) Bulan, dan pelaksanaan perubahan telah dilakukan tidak lebih dari 1 bulan
			Keterangan	-

	penerbitan sertifikat/label. b. Pada Pelayanan Laboratorium Proteksi Tanaman, jangka waktu ditulis 15 hari kerja untuk semua moda (pengendalian OPT, uji APH, maupun penyediaan APH), padahal penyediaan APH yang stoknya tersedia seharusnya selesai dalam hitungan jam. Hal ini berpotensi memicu klaim pelayanan lambat atau maladministrasi dari pengguna layanan karena target norma waktu yang tidak realistis secara teknis di lapangan.			
2.	Kurangnya transparansi dan kejelasan terkait retribusi (Biaya/Tarif), contoh : a. Komponen biaya hanya mencantumkan aturan yang mengacu kepada Perda Retribusi Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah. b. Tidak ada rincian besaran tarif per unit	Tuliskan besaran tarif yang jelas dan transparan dalam bentuk nilai rupiah pada masing-masing layanan tersebut berdasarkan Perda Retribusi Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.	Bentuk Tindak Lanjut Waktu Pelaksanaan Keterangan	Telah dilakukan Perubahan pada Standard Pelayanan Nomor 136/Kpts-DKP2KH/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 Sesuai Berita Acara FKP diberikan waktu selama Enam (6) Bulan, dan pelaksanaan perubahan telah dilakukan tidak lebih dari 1 bulan -

	layanan (misalnya: biaya pengujian per sampel, biaya penjualan bibit per batang, atau penjelasan tidak ada biaya (Rp 0,- / Gratis) untuk layanan yang memang tidak terdapat tarif di dalam perda retribusi tersebut. Hal ini dapat mengurangi asas transparansi pelayanan publik dan membuka celah pungli atau ketidakpastian biaya bagi pengguna layanan.			
--	--	--	--	--

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 30 Januari 2026

KEPALA UPTD BALAI PERBENIHAN, KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN,



NIL ERISON, S.TP
NIP. 19750312 200502 1 005



DR. EKA AZMI, S.TP., M.M
NIP. 19741208 200212 2 005

LAMPIRAN VI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Gedung B2 Lantai 2
e-mail : dkp2kh.kepri@gmail.com Tanjungpinang Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

SURAT TUGAS

Nomor: 82 /XI/DKPPKH/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama-nama dan Jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk : 1. Menjadi Tim Kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Forum Konsultasi Publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik UPTD Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Tugas ini sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2026;
2. Uraian tugas Tim Kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Forum Konsultasi Publik UPTD Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Tugas ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 November 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RIKA AZMI, S.TP., M.M.

Kepala Muda (IV/c)

No. 10741208 200212 2 005

Lampiran I Surat Tugas
Nomor : 82 /XI/DKPPKH/2025
Tanggal : 24 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
UPTD PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab *Outcome*
Nama : DR. Rika Azmi, S.TP., M.M
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19741208 200212 2 005
Jabatan : Kepala DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau
- II. Koordinator
Nama : Nil Erison, S.TP
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
NIP : 19750312 200502 1 005
Jabatan : Kepala UPTD. BPPSPTPHP
- III. Ketua Tim
Nama : Adnan, S.P., M.M
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
NIP : 19820527 201001 1 012
Jabatan : Kepala Sub Bagian TU UPTD BPPSPTPHP
- IV. Anggota Tim
- a. Nama : Ade Satria Khairunsyah, S.TP
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19780811 200803 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman
- b. Nama : Joko Sentioso, S.Hut.
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19761004 200803 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi Benih
- c. Nama : Fahmy Jonindra Ramadhan
Pangkat/Gol : V
NIP : 1989042220252118
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 November 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RIKA AZMI, S.TP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005

Lampiran II Surat Tugas
Nomor : 82 /XI/DKPPKH/2025
Tanggal : 24 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
UPTD PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2026**

No.	Peran dalam Tim	Uraian Tugas
I.	Penanggung Jawab	a. Memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan FKP. b. Menetapkan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui hasil FKP. c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim. d. Mengesahkan berita acara, komitmen perbaikan, dan laporan hasil pelaksanaan FKP. e. Mengesahkan laporan hasil pelaksanaan forum konsultasi publik lingkup UPTD BPPSPTPHP.
II.	Koordinator	a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim FKP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. b. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kegiatan, target, sasaran, peserta, dan metode pelaksanaan FKP. c. Memastikan pelaksanaan FKP sesuai ketentuan. d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan FKP. e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
III.	Ketua Tim	a. Menyusun rencana kerja tim FKP. b. Memimpin dan mengkoordinasikan anggota tim dalam pelaksanaan teknis FKP. c. Memastikan proses diskusi berlangsung secara partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. d. Mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi pendukung lainnya. e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
IV.	Anggota Tim	a. Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan ide/ isu permasalahan. b. Menyiapkan bahan, data pendukung, dan administrasi pelaksanaan FKP. c. Mengikuti proses diskusi serta memberikan masukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

		d. Membantu penyusunan notulensi, berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan komitmen hasil FKP. e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
--	--	--

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 November 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DR. RIKA AZMI, S.TP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005